

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM NEGARA DENMARK: DINAMIKA KEBIJAKAN IMIGRAN HINGGA PANDANGAN PUBLIK MENGENAI IMIGRAN DI DENMARK**

Pada Bab II ini berisikan data mengenai sejarah dan identitas negara Denmark, dinamika kebijakan imigran di Denmark, dinamika anti-imigran di Denmark, respons pemerintah terhadap imigran dari wilayah Timur Tengah dan Afrika khususnya Suriah. Selain itu penulis akan menambahkan data-data mengenai partai politik yang berpengaruh di Denmark, serta tindakan para imigran yang membuat pemerintah Denmark secara tegas melakukan pembatasan terhadap imigran dari wilayah tersebut. Dalam bab ini penulis juga menambahkan data mengenai bagaimana publik Denmark terhadap para imigran yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika khususnya Suriah.

#### **2.1 Sejarah dan Identitas Negara Denmark**

Denmark merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa bagian Utara di mana terdapat Swedia di sebelah barat daya dan Norwegia di arah selatan. Denmark termasuk ke dalam negara Nordik (World Bank, 2020). Negara Nordik sendiri mengacu kepada negara – negara yang berada di wilayah Eropa Timur hingga Atlantik Utara (Prakoso, 2021).

Eksistensi sejarah Denmark tak dapat dipisahkan dari bangsa Viking. Bangsa Viking sendiri suku yang berasal dari wilayah Skandinavia yang

kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, nelayan dan perompak. Pada abad ke – 8, bangsa Viking datang berhasil menguasai wilayah Denmark (Britannica, 2023). Kekuasaan Viking di Jerman berakhir ketika Kristen mulai memasuki negara ini pada abad ke – 10 di mana pada saat itu Denmark, Norwegia dan Swedia digabung dalam satu sistem Kerajaan yang disebut Persatuan Kalmar (Uni Kalmar). Pada dasarnya, tiga kerajaan dalam Persatuan Kalmar ini tetap memiliki kedaulatan yang terpisah, akan tetapi kebijakan dalam dan luar negerinya tetap dipimpin oleh 1 pemimpin, yakni Ratu Margareth I of Denmark (Widiastutie, 2006).

Akan tetapi, Persatuan Kalmar ini menimbulkan kecemburuan di antara 2 negara, yakni Norwegia dan Swedia yang merasa kekuasaan Denmark di persatuan ini terlalu besar. Akibatnya pada awal abad ke – 16, Swedia memutuskan untuk keluar dari Persatuan Kalmar yang kemudian diikuti oleh Norwegia pada 1814 (Widiastutie, 2006).

Pada saat itu, sistem pemerintah Denmark adalah monarki absolut. Sistem ini diperkenalkan oleh Raja Frederik III pada 1660. Sistem monarki absolut ini ditentang oleh masyarakat Denmark. Pada saat pemerintahan monarki absolut diterapkan, masyarakat Denmark dipaksa untuk memberikan upeti kepada raja. Kerajaan juga memberlakukan pajak yang tinggi untuk setiap bangsawan yang memiliki ladang dan bangunan. Akhirnya pada 1848, masyarakat Denmark berhasil melakukan revolusi dengan mengubah sistem kerajaan absolut menjadi kerajaan konstitusi di bawah kepemimpinan Raja Frederik VI (Britannica, 2023).

Memasuki era Perang Dunia, Denmark menjadi salah satu negara yang mengumumkan status netral dan tidak memihak kubu manapun yang berperang saat itu. Kebijakan netralitas yang dianut oleh Denmark dilakukan karena Denmark belajar dari situasi koalisi Rusia, Prussia (Jerman), Inggris, Austria dan Prancis. Saat itu, koalisi memiliki power yang sangat besar yang tersebar hingga seluruh Eropa. Mulai tercipta hubungan ketergantungan antara negara – negara yang lebih kecil dengan koalisi tersebut. Denmark menyadari jika hubungan ketergantungan semacam ini justru membuat negara – negara yang lebih kecil tadi tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan layaknya sebuah negara yang berdaulat (Shishkina, 2006). Selain dikarenakan tidak ingin bergantung dengan negara lain, kebijakan netralitas juga dipengaruhi oleh kebijakan isolasi Denmark yang diterapkan awal 1900. Kebijakan ini diberlakukan Denmark karena Denmark merasa posisi negara yang terlalu berdekatan dengan Baltik akan memudahkan negara lain untuk menyerang. Sehingga dengan berbagai pertimbangan, Denmark memutuskan untuk bersikap netral dan tidak “ikut – ikutan” dalam era perang dunia (Franke, 2021).

Dengan adanya kesadaran bahwa adanya rasa ketergantungan terhadap negara lain dapat menimbulkan tidak adanya rasa kebebasan bagi Denmark, dan didorong dengan kebijakan isolasi yang diterapkan oleh Denmark. Maka Denmark memutuskan untuk bersikap netral dan tidak memihak siapapun pada saat Perang Dunia. Hal ini tentu saja untuk mengantisipasi adanya intervensi yang dilakukan oleh negara lain yang memiliki *power* cukup besar seperti Rusia, Jerman, Prancis, dan Austria, hal ini juga dipengaruhi oleh lokasi geografis Denmark yang strategis dengan wilayah Baltik.

Akan tetapi, kebijakan netralitas ini tidak berjalan dengan baik setelah Jerman mengancam akan menyerang teritorial air milik Denmark jika Denmark menolak untuk membantu Jerman. Denmark yang tidak memiliki pilihan lain pun terpaksa membantu Jerman. Denmark menjadi pemasok perkapalan untuk membantu Jerman di perang dunia. Akan tetapi, koalisi keduanya pun pecah ketika peristiwa Holocaust terjadi. Denmark menolak menyerahkan bangsa Yahudi yang bermukim di Denmark kepada Jerman. Alhasil, 90% bangsa Yahudi yang ada di Denmark berhasil diselamatkan (Blakemore, 2019).

Kebijakan netralitas Denmark juga diterapkan pada saat Perang Dunia II pecah. Kebijakan netralitas yang dianut oleh Denmark kemudian dipertanyakan ketika negara ini bersama 11 negara lainnya membentuk NATO (*the North Atlantic Treaty Organization*) pada 1949. Akan tetapi, Denmark sendiri memberikan alasan bahwasanya meskipun berada dalam keanggotaan NATO, kebijakan netralitas masih akan diterapkan. Denmark pun mengajukan tiga syarat di dalam keanggotaannya di NATO, yakni tidak boleh ada pangkalan militer, tidak boleh ada pemasangan senjata nuklir dan aktivitas militer lainnya yang berada di dalam teritorial Denmark (NATO, 2023). Dengan adanya tiga syarat dalam keanggotaannya di NATO, hal ini dapat membantu mempertahankan sifat defensif dari adanya pendirian aliansi. Selain itu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan Uni Soviet pada saat itu. Namun, dengan adanya pembatasan dari tiga syarat keanggotaan yang diajukan oleh Denmark tidak semata-mata menghentikan mereka untuk berpartisipasi dalam latihan perang oleh NATO.

Pada saat inilah, kebijakan netralitas Denmark mulai berubah yang awalnya tidak ingin terlibat dengan aliansi menjadi bergabung dalam NATO akan membuat Denmark mendapatkan *social support*. *Social support* ini dapat berupa adanya perlindungan yang akan diberikan oleh negara anggota NATO untuk Denmark. Kebijakan netralitas ini pula yang akhirnya menjadi identitas Denmark. Melalui kebijakan ini, Denmark dapat secara bebas bekerja sama dengan negara manapun. Kebijakan ini memberikan keuntungan untuk sektor ekonomi Denmark (Shishkina, 2006). Selain kebijakan netralitas Denmark pada masa Perang Dunia yang diadopsi menjadi identitas Denmark. Denmark juga memiliki nilai-nilai yang ada di negaranya. Nilai-nilai tersebut adalah *Danishness* dan *Denmark Canon* yang mencerminkan identitas Denmark yang telah mengakar di masyarakatnya.

## **2.2 Dinamika Kebijakan Imigran di Denmark**

Imigrasi bukan lagi isu baru di Denmark. Pada tahun 1940 – an, Denmark sendiri secara terbuka telah menerima pengungsi Yahudi dari Jerman pasca peristiwa Holocaust. Imigrasi kembali menjadi isu di perpolitikan Denmark dimulai pada tahun 1981. Pada saat itu, jumlah imigran yang masuk ke Denmark secara perlahan mulai menunjukkan kenaikan yang pada awalnya kurang dari 1% di tahun 1994 menjadi 13,5% pada tahun 2001 (Pederson, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya lonjakan imigran ke Denmark juga didasari atas posisinya sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi. Dimana negara-negara yang berpartisipasi dalam konvensi tersebut wajib untuk membuka tangan kepada para imigran-imigran untuk menjamin hak mereka.

Perjalanan kebijakan imigran di Denmark dimulai pada tahun 1967. Pada tahun 1967 – 1970, Denmark tengah berusaha menumbuhkan perekonomian yang dimulai dengan membangun sektor industri. Untuk itu, Denmark membutuhkan banyak tenaga kerja dengan biaya murah. Maka dibentuklah kebijakan imigran pertama pada 1967 di mana kebijakan ini memperbolehkan adanya *remmedarbejdere* atau pekerja asing untuk membantu karyawan lokal di sektor industri. Para pekerja asing ini didatangkan dari sejumlah negara seperti Turki, Pakistan dan Yugoslavia. Pada saat itu, Denmark lebih memilih pekerja asing pria saja dan hanya bekerja dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya akan dikembalikan ke negara masing – masing (Olesen, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya Denmark merupakan negara yang menerima kedatangan para pekerja asing dan imigran, selain itu adanya para tenaga kerja dengan upah yang murah akan lebih menguntungkan Denmark secara ekonomi.

Kebijakan imigrasi di Denmark mulai berubah ketika Denmark bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa pada 1 Januari 1973. Uni Eropa sendiri memiliki prinsip yang sama dengan Konvensi Jenewa 1951 di mana Uni Eropa akan terbuka terhadap gelombang imigran dan memberikan perlindungan untuk para imigran yang masuk ke wilayah Eropa. Denmark yang menjadi anggota Uni Eropa ini pun menjunjung prinsip ini. Akan tetapi, Denmark menjadi salah satu negara terdampak krisis minyak pada tahun akhir tahun 1973. Krisis minyak ini terjadi karena kebijakan embargo dari Arab Saudi untuk negara – negara yang mendukung Israel Perang Yom Kippur. Embargo ini ditujukan kepada Kanada, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat yang berujung pada negara – negara lainnya yang sama

sekali tidak terlibat dalam isu ini. Akibatnya, sektor industri Denmark yang juga menggunakan jasa minyak Arab Saudi mati total dan mengakibatkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar – besaran. Akibat dari kondisi ini memaksa pemerintah Denmark untuk memberhentikan kebijakan transfer pekerja asing untuk masing ke Denmark (Olesen, 2019). Adanya krisis minyak karena embargo dari Arab Saudi, membuat Denmark juga terdampak krisis minyak. Dalam sektor industri, Denmark bergantung dengan Arab Saudi karena sumber daya minyaknya yang melimpah. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi Denmark, serta membuat pemerintah Denmark harus berhenti untuk mendatangkan pekerja dari luar, dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja secara massal.

Setelah keadaan mereda, Denmark kembali fokus pada gelombang imigran dengan membuat draft khusus imigran bernama the Aliens Act pada tahun 1983. Aturan ini akhirnya diresmikan yang mana berisikan pemberian legal status untuk setiap imigran yang masuk ke Denmark. Aturan ini juga mengatur proses residensi, kewarganegaraan dan urusan lainnya yang berkaitan dengan kondisi imigran di Denmark. Dikarenakan adanya aturan ini, gelombang imigran yang masuk ke Denmark pun menjadi tidak terkendali (Olesen, 2019).

Pemerintah Denmark selanjutnya melakukan revisi terhadap isi kebijakan ini yang berfokus pada tiga hal yaitu

1. Status legal seorang imigran harus dihapus jika terbukti tidak memenuhi syarat dari pemerintah Denmark dan UNHCR

2. Imigran tersebut harus dikembalikan ke negara masing – masing jika tidak memenuhi syarat dari pemerintah Denmark dan UNHCR
3. Negara harus bertanggung jawab terhadap setiap pembiayaan dan akomodasi pemulangan para imigran ke negaranya masing – masing (Olesen, 2019).

Selanjutnya di tahun 1999, pemerintah Denmark merilis sebuah kebijakan imigrasi baru, yakni *Integration Act*. Aturan ini berfokus pada bagaimana mengatur penyebaran imigran di Denmark yang tidak hanya ada di level daerah tetapi juga nasional. Aturan ini kemudian diikuti oleh kebijakan baru ialah *Immigrant Package* yang diterapkan setahun kemudian. Di dalam kebijakan *Immigrant Package* ini, pemerintah Denmark memberikan berbagai persyaratan untuk setiap imigran yang ingin memperoleh kewarganegaraan Denmark, salah satunya harus menguasai bahasa Denmark (European Commission, 2023).

Alasan syarat penggunaan bahasa Denmark adalah pemerintah ingin memfokuskan para imigran untuk membantu membangun sektor industri dalam negeri. Selain itu, pemerintah Denmark juga akan berbagai fasilitas untuk imigran yang bekerja seperti tempat tinggal permanen. Kebijakan pemerintah Denmark untuk menempatkan para imigran di sektor di industri juga diwujudkan dalam kebijakan *Tripartite Agreement* yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Di dalam kebijakan ini, pemerintah Denmark mengadakan perjanjian dengan pemangku kebijakan setempat seperti organisasi buruh, perusahaan, pabrik hingga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) guna membantu proses pemberdayaan imigran di

dalam dunia kerja. Kerja sama ini juga melaksanakan training agar para imigran dapat memasuki dunia kerja lebih cepat dan tentu saja telah memperoleh berbagai keahlian (European Commission, 2023).

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah juga memperlihatkan beberapa keberhasilan, antara lain :

1. Sebanyak 42% imigran yang masuk ke Denmark pada 2015 telah bekerja di sektor industri kurang lebih selama 5 tahun.
2. 68% imigran telah berhasil lulus dari ujian bahasa Denmark
3. Sebanyak 64% imigran yang berusia 20 hingga 24 tahun telah berhasil menempuh pendidikan di Denmark dengan menggunakan bahasa Denmark (European Commission, 2023).

### **2.3 Dinamika Perkembangan Anti – Imigran di Denmark**

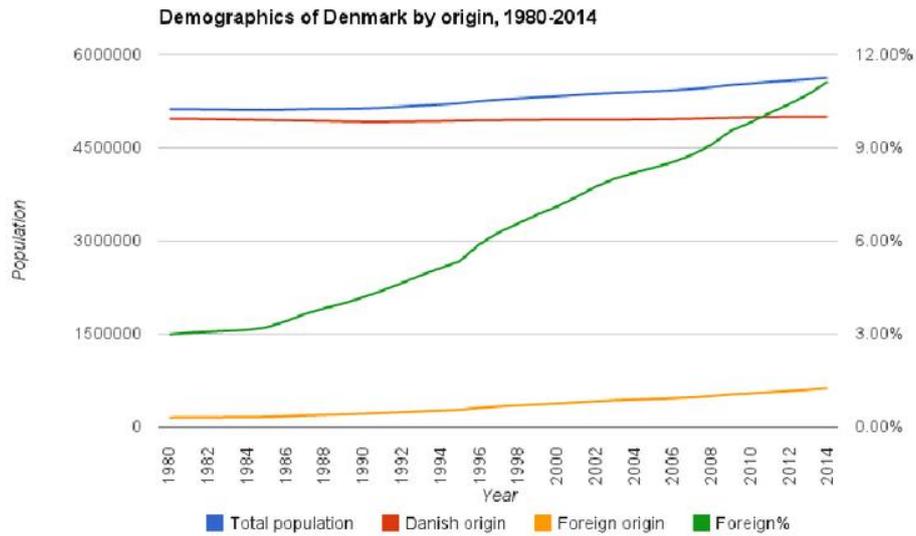
Meskipun telah memperoleh sederet keberhasilan dalam pemberdayaan imigran, fenomena anti – imigran juga muncul di Denmark. Isu anti – imigran sebenarnya bukan isu baru di Eropa. Isu ini pertama kali muncul pada tahun 1970 – an yang mana pada saat itu bentuk dari imigrasi adalah reuni keluarga. Fenomena ini kemudian membuat Jerman dan Prancis mulai memberlakukan kebijakan pembatasan untuk setiap orang yang ingin masuk ke negara mereka. Dari momen inilah isu anti – imigran mulai dikenal hingga ke seluruh Eropa (Karjaya, 2022) Dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh masing-masing negara di Uni Eropa, hal tersebut guna menekan jumlah imigran dan pengungsi yang datang dari

luar kawasan Uni Eropa. Selain itu juga untuk menjaga stabilitas keamanan negara mereka dari adanya ancaman yang dapat ditimbulkan oleh imigran dari luar kawasan Uni Eropa.

Pada saat resmi masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa pada 1973, Denmark dikenal sebagai salah satu negara yang ramah dan terbuka terhadap gelombang imigrasi. Hal ini dikarenakan Denmark pun mendapatkan keuntungan dari kehadiran imigran yang nantinya akan ditempatkan untuk mendukung sektor industri. Akan tetapi di tahun 1990 – an isu anti imigran mulai muncul di Denmark yang ditandai dengan memanasnya perdebatan antara pro – imigran dan anti – imigran. Kehadiran anti – imigran ini tidak dapat dilepaskan dari gelombang imigran yang beragama Muslim yang mulai memasuki Denmark (Yunazwardi, 2021). Denmark yang pada awalnya merupakan negara yang aktif dalam penerimaan imigran mulai memperketat aturannya terkait imigran. Hal ini awalnya karena kebutuhan Denmark akan tenaga kerja yang dapat mendorong sektor ekonomi dan industri mereka, seiring dengan perkembangannya masuknya para imigran dari luar Denmark juga merupakan suatu masalah yang mereka hadapi. Hal ini juga karena gelombang imigran yang masuk ke Denmark juga merupakan imigran asal Timur Tengah dan Afrika khususnya Suriah yang mayoritas beragama muslim. Hal ini yang menimbulkan adanya pertentangan di Denmark.

**Grafik 2.1**

**Demografi Peningkatan Imigran Denmark Tahun 1980-2014**



Sumber : (Kirkegaard, 2015)

Pertumbuhan imigran di Denmark menunjukkan perkembangan yang signifikan. Data di atas menunjukkan bagaimana setiap tahunnya angka imigran selalu naik. Dengan semakin naiknya jumlah imigran, maka angka imigran beragama muslim pun ikut melonjak. Pada tahun 2020, jumlah imigran muslim di Denmark telah menyentuh angka 256.000 jiwa yang kemudian melonjak hingga 300.000 jiwa pada 2021. Fenomena ini yang kemudian membuat gelombang anti – imigran semakin menjadi – jadi. Ditambah agama mayoritas di Denmark adalah Kristen sehingga pertentangan antara warga negara beragama Kristen dan imigran muslim pun tidak dapat dihindari (Rauhala, 2023). Dari data tersebut dapat

disimpulkan bahwa adanya lonjakan signifikan dari imigran yang datang ke Denmark semakin membuat adanya kekhawatiran akan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga tidak lepas dari adanya persepsi buruk pada imigran dari luar Denmark, khususnya yang beragama muslim

Sejak memasuki tahun 2000 – an, pemerintah Denmark semakin gencar memberlakukan kebijakan untuk membendung angka imigran muslim. Salah satunya datang dari pemerintahan Perdana Menteri, Anders Fogh Rasmussen pada tahun 2001. Pada saat itu, Rasmussen memberlakukan kebijakan pembatasan imigran. Dan kebijakan ini terbukti berhasil karena mampu menekan angka imigran hingga 80% (Azzo, 2021). Akan tetapi, kebijakan ini pun mendapatkan kecaman karena dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi Uni Eropa yang yang harusnya terbuka dan menerima gelombang imigran. Kelompok anti – imigran pun beralasan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi gelombang masuk imigran merupakan hal benar dikarenakan cara ini dilakukan untuk melindungi “*Danishness*” di mana pernyataan ini dapat dinyatakan bahwa kelompok anti – imigran tidak ingin “darah” asli Denmark hilang dikarenakan populasi imigran terus meningkat. Selain itu pula, kelompok ini juga tak ingin ada yang menggantikan agama Kristen sebagai agama yang telah ada di Denmark sejak berabad – abad lamanya (Rauhala, 2023). Fenomena anti – imigran terus meningkat tajam di Denmark. Fenomena ini dapat tumbuh sedemikian rupa karena pemerintah Denmark pun terkesan turut mendukung pembatasan gelombang masuk imigran. Salah satunya dibuktikan melalui amandemen *Integration Act*. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan *Integration Act* dikeluarkan pada tahun

1999. Amandemen pun dilakukan dengan semakin memperketat proses seleksi setiap imigran yang masuk ke Denmark (Rauhala, 2023).

Pada tanggal 26 Januari 2016, Parlemen Denmark melakukan pemungutan suara yang dilakukan untuk mengurangi jumlah *asylum seekers* yang tiba di Denmark. Undang-undang terkait adanya pengurangan pencari suaka mengacu pada *Bill of the Law on Amending the Aliens Act, Law No. 87 (January, 26 2016)*. Undang-undang ini akan berlaku setelah diterbitkan di *Danish Gazette (Lovetide)*. Upaya yang dilakukan didasarkan pada *asylum packet (Asylpakke)* yang disampaikan kepada publik oleh pemerintah Denmark pada tanggal 13 November 2015 (Hofverberg, 2016). *Asylum packet* tersebut berisikan mengenai:

1. Pengurangan 10% bantuan ekonomi pada pencari suaka.
2. Dinas Imigrasi Denmark berwenang untuk menyita asset guna mendukung tinggalnya pencari suaka di Denmark.
3. Peningkatan ambang batas mengenai durasi seorang pencari suaka harus membayar biaya perumahannya sendiri.
4. Pencari suaka harus tinggal di perumahan khusus dan tidak diperbolehkan mencari tempat tinggal sendiri.
5. Polisi berwenang untuk menggeledah barang bawaan pencari suaka sebagai penunjang biaya tinggal mereka (Hofverberg, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Martin Linhardt dengan judul *“Islam and the Anti – Islamic Emblems of Cultural Difference in Danish Neo – Nationalism”* yang memaparkan proses seleksi ini dinamakan *“integration*

*potential*". Integration potential merujuk pada tindakan "pilih kasih" terhadap pengungsi tertentu. Pemerintah Denmark akan memberikan kemudahan kepada pengungsi yang beragama Kristen daripada Islam (Linhardt, 2022). Isu anti – imigran juga digunakan di dalam Pemilu (Pemilihan Umum) di Denmark. Peristiwa ini berlangsung pada Pemilu di tahun 2015 antara Lars Lokke Rasmussen dari *Social Democratic Party* dan Thorning – Schmidt dari *Danish People's Party*. Keduanya berusaha menunjukkan dukungan terhadap fenomena anti – imigran yang dikemas dengan bahasa yang seakan – akan menunjukkan bahwa Denmark masih negara yang menjunjung egaliter (persamaan) baik itu untuk warga negara Denmark maupun imigran. Keduanya berkampanye bagaimana upaya untuk mengelola gelombang imigran kepada publik Denmark (Linhardt, 2022).

#### **2.4 Respon Pemerintah Denmark terhadap Imigran Timur Tengah dan Afrika**

Sejak bergabung dengan Uni Eropa pada 1973, Denmark telah banyak menerima gelombang pengungsi dari berbagai negara. Imigran dari Turki masih berada pada teratas sebagai imigran dengan jumlah paling banyak di Denmark yang kemudian diikuti oleh dua negara Eropa lainnya yakni Polandia dan Rumania. Dari Timur Tengah sendiri terdapat Suriah, Irak, Iran, Pakistan, Afganistan serta Lebanon. Sementara imigran dari Afrika cenderung lebih sedikit yang didominasi oleh Somalia dan Maroko (Denmark, 2023 ).

**Tabel 2.1**

**Imigran Timur Tengah di Denmark 2000 - 2020**

Negara	Jumlah		
	2000	2010	2020
Suriah	2.284	3.707	42.968
Irak	14,902	29,264	33,381
Iran	12,980	15,209	21,701
Afganistan	3,275	12,630	19,488
Lebanon	19,011	23,775	27,310

Sumber : (Denmark Statistic, 2020)

Data di atas merupakan lima negara teratas dari Timur Tengah. Dapat terlihat bagaimana kelima negara ini mengalami kenaikan jumlah imigran yang signifikan.

**Tabel 2.2**

**Imigran Afrika di Denmark 2000 - 2020**

Negara	Jumlah		
	2000	2010	2020
Somalia	14,856	16,831	21,072
Maroko	7,813	9,831	11,659

Sumber : (Denmark Statistic, 2020)

Sementara, data berikut menunjukkan dua negara Afrika yang paling banyak menyumbang imigrasi ke Denmark, yakni Somalia dan Maroko. Meskipun angkanya tidak sebesar jumlah imigran dari negara Timur Tengah, akan tetapi kedua negara ini terus menunjukkan kenaikan mulai dari tahun 2000 hingga 2020. Maka dari jumlah data imigran dari Timur Tengah dan Afrika dapat disimpulkan adanya kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah imigran yang masuk ke Denmark. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran untuk pemerintah Denmark.

Fenomena pun mulai berubah yang awalnya lebih berfokus pada anti – imigran menjadi *non – western*. *Non – western* sendiri merupakan gelombang imigran yang berasal bukan dari “*parallel society*”. Banyak yang mengartikan bahwa *parallel society* ini merujuk kepada negara – negara yang masuk ke dalam negara Uni Eropa, negara – negara yang mayoritas beragama Kristen dan negara –

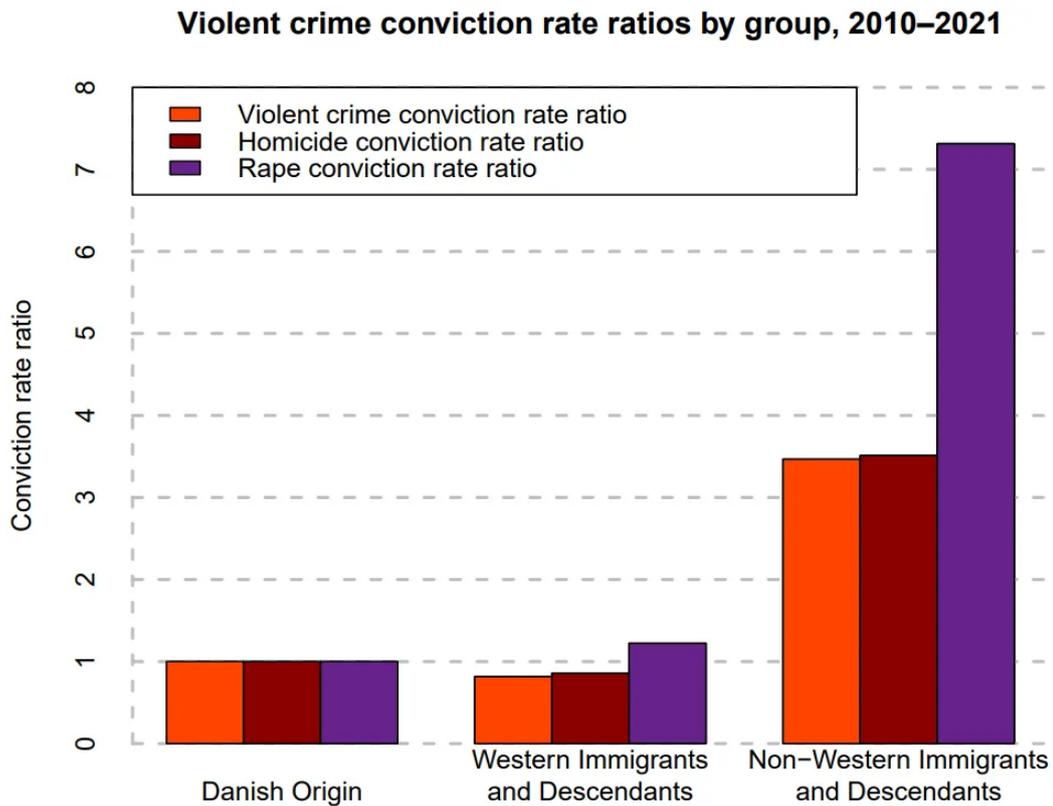
negara dengan mayoritas ras Kaukasia (ras kulit putih) yang tersebar di Benua Amerika, Eropa, Australia serta Selandia Baru (Linhardt, 2022).

Pemerintah Denmark melalui Menteri Imigrasi dan Integrasi, Mattias Tesfaye pun membagi statistik imigran yang masuk ke dua jenis, yakni *parallel society* dan *non – western*. *Parallel society* terdiri dari beberapa negara Eropa, Kanada, Turki, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Vatikan dan lain – lain. Sementara, untuk *non – western* lebih didominasi oleh negara – negara Timur Tengah dan Afrika. Anehnya, negara – negara yang masuk ke dalam golongan *non – western* mayoritas berasal dari negara dengan mayoritas beragama muslim (Tarasiewicz, 2017).

Beberapa ahli berpendapat bahwasanya pembagian statistik yang dilakukan oleh Denmark justru dianggap sebagai bentuk rasisme terhadap agama. Akan tetapi, Mattias Tesfaye secara terang – terangan mengungkapkan bahwa pembagian statistik imigran ini bukan bermaksud untuk menyebarkan rasisme agama tertentu di dalam negeri, melainkan untuk mengantisipasi kekerasan yang datang dari negara – negara *non – western*, khususnya yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika (European Commission, 2020).

Grafik 2.2

*Violent crime conviction by group di Denmark Tahun 2010-2021*



Sumber : (BIRD, 2023)

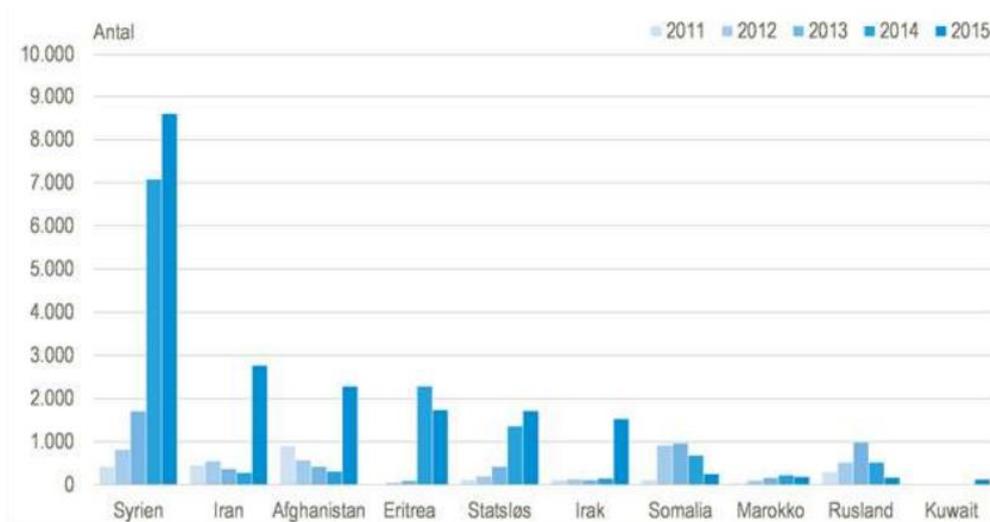
Melihat data di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kekerasan di Denmark pelakunya didominasi oleh imigran yang datang dari negara *non – western*. Hal ini berkisar 3,5 kali lebih tinggi daripada penduduk asli yang ada di Denmark. Secara keseluruhan, imigran Barat memiliki tingkatan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk asli. Inilah yang menyebabkan respon pemerintah Denmark cenderung mengarah ke rasisme.

## 2.5 Respon Pemerintah Denmark Mengenai Imigran Dari Negara Suriah

Adanya krisis pengungsi mengakibatkan dampak besar terhadap kebijakan mengenai imigran, pengungsi, dan pencari suaka di Denmark. Hal ini ditambah dengan banyaknya imigran dari wilayah Suriah yang melarikan diri dari adanya konflik di negara mereka.

**Grafik 2.3**

### Jumlah Imigran Denmark Dari Wilayah Timur Tengah Tahun 2011-2015



Sumber: (Statistics Denmark, 2016)

Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa Suriah merupakan negara dengan jumlah imigran terbanyak di Denmark. Terdapat juga peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 dan 2015. Dimana jumlah pencari suaka asal Suriah mencapai 41% dari total jumlah pencari suaka di Denmark pada tahun 2015 (Statistics Denmark,

2016). Banyaknya permohonan pencari suaka dan pengungsi di Denmark sangat berdampak pada sistem suaka dan kebijakan mengenai pengungsi selama krisis pengungsi. Krisis ini memberikan dampak ke Denmark dan lembaga politik yang ada di negara tersebut.

Dengan munculnya krisis tersebut, Pemerintah Denmark membuat suatu kebijakan yang bukan hanya membatasi masuknya pengungsi, imigran, dan pencari suaka tetapi untuk mencegah mereka mengajukan permohonan dan mencari suaka di Denmark (Pascaline, 2016). Pemerintah Denmark memberikan respon terhadap kasus ini dengan cara memotong tunjangan kesejahteraan dan meningkatkan hambatan birokrasi untuk mempersulit pengungsi mendapatkan status tempat tinggal (Kreichauf, 2020). Pada tahun 2015, Parlemen Denmark mengadopsi perubahan di beberapa bidang. Dimana pada bulan Agustus 2015, mereka memotong tunjangan pengungsi di Denmark sebesar 45% dan tunjangan bulanan untuk orang dewasa yang tidak memiliki keturunan dipotong dari 10.849 Kroner menjadi 5.945 Kroner (Kreichauf, 2020).

Selain itu pemerintah Denmark menerbitkan lewat surat kabar di Lebanon dan Yordania mengenai pembatasan suaka baru (Hugh, 2016). Lebih dari itu, Pemerintah Denmark juga memutuskan untuk mengubah peraturan suaka agar prosedur pengembalian suaka yang ditolak menjadi lebih cepat (Kvist, 2016). Bahkan sebelum adanya krisis pengungsi Suriah yang melanda Eropa, Partai Rakyat Denmark, *Danskfolke Party* merupakan partai di Denmark yang secara terang-terangan menentang adanya imigran dan menyebarkan anti-imigran ke

seluruh lapisan politik dan masyarakat di Denmark. Partai tersebut juga menerapkan kebijakan yang keras terhadap pengungsi (Hugh, 2016).

## **2.6 Pandangan Publik Denmark Mengenai Imigran Dari Suriah**

Adanya kehadiran imigran di Denmark khususnya yang beragama muslim, sudah menjadi suatu permasalahan dan perdebatan dalam perpolitikan dan publik Denmark (Lindhart, 2022). Isu ini banyak menyita perhatian publik Denmark karena mereka menganggap bahwa, para imigran muslim tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Denmark. Seperti yang sudah di cantumkan pada data pada subbab sebelumnya, adanya imigran muslim di Denmark sudah ada lebih dari satu dekade yang lalu. Adanya hal tersebut juga menimbulkan kritik yang diterapkan oleh kebanyakan orang Denmark mengenai imigrasi (Lindhart, 2022). Adanya imigran muslim yang mayoritas berasal dari wilayah Suriah menimbulkan anggapan bagi masyarakat Denmark bahwa hal tersebut akan menimbulkan ancaman bagi nilai-nilai dan budaya yang telah mengakar pada masyarakat Denmark.

Adanya potensi ancaman terhadap nilai dan budaya yang ada di Denmark, telah meningkat secara signifikan dalam kurun waktu 30-35 tahun terakhir. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa tindakan negara Denmark terkait imigran didasari atas dasar ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan adanya tindakan kejahatan oleh para imigran (Smiley, 2017). Hal ini juga di tambah dengan adanya kecenderungan yang berkembang di kalangan media dan politisi Denmark, perkembangan ini juga hingga ke Partai Rakyat Denmark yang bersifat populis (Moors, 2009). Partai politik yang didukung masyarakat Denmark juga sangat

mempengaruhi bagaimana sikap mereka terhadap isu mengenai imigran (Smiley, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga dekade terakhir telah muncul banyak pertentangan dan persepsi negatif mengenai adanya potensi ancaman yang dilakukan oleh imigran khususnya yang beragama muslim terhadap nilai-nilai yang ada di Denmark.

Alasan lainnya yang membuat suatu lonjakan mengenai isu imigran adalah pemilu 2015, dimana pada saat itu imigrasi merupakan masalah politik yang menentukan. Ditambah dengan partai sayap kanan yang menyebarkan mengenai retorika anti-imigran (Dinesen, 2020). Hal ini juga ditambah dengan adanya penembakan di Denmark yang dilakukan oleh putra imigran dari Palestina dan Yordania, yang menembaki pusat kebudayaan dan Bat Mitzvah di Copenhagen pada tahun 2015 (Smiley, 2017). Hal ini tentu saja menyebabkan dampak yang besar bagi warga kota dan wacana publik mengenai imigran yang berasal dari luar Denmark. Hal tersebut juga termanifestasi kedalam pemilihan parlemen pada tahun 2019 ketika terdapat dua partai populis dengan agenda anti-muslim turut serta dalam penghitungan suara (Lindhart, 2022).